

PENGARUH REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017-2022**Diana Ratih^{a*}, Aris Soelistyo^b**^{a,b} Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang

* Corresponding author: dianaratih71@gmail.com

Abstract

This research aims to examine the influence of the Regional Budget (APBD) on the Gross Regional Domestic Product (GRDP) in West Nusa Tenggara. The data used in this study are secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of West Nusa Tenggara and the Directorate General of Budget, Ministry of Finance, from 2017 - 2022. The data analysis technique used regression panel data. The result indicates that Local Own Revenues (PAD), General Allocation Fund (DAU), Specific Allocation Fund (DAK), and Capital Expenditure (BD) do not have a significant impact on the PDRB in West Nusa Tenggara. However, Revenue Sharing Fund (DBH) has a positive significant influence on the PDRB in West Nusa Tenggara.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh APBD terhadap PDRB di Nusa Tenggara Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder yang berasal dari BPS Nusa Tenggara Barat dan DJPK Kemenkeu dari tahun 2017- 2022. Teknik analisis data yang analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah (BD) tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Nusa Tenggara Barat. Sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB di Nusa Tenggara Barat.

Keywords: regional economic growth; regional budget; local revenue; local expenditure

JEL Classification:**H72, P25, R11****Artikel Info***Article history:*

Received 30 September 2023

Revised 12 Januari 2024

Accepted 12 Februari 2024

Available online 15 Februari 2024

Copyright (c) 2024

Diana, R. & Aris, S.

This is an open access article and licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

**PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi menjadi gambaran dalam efektivitas pengelolaan suatu wilayah. Daerah mempunyai hak otonom untuk pengelolaan

daerahnya sendiri, hak tersebut diatur didalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 dan No. 33 tahun 2008 mengenai hak setiap daerah dalam mengatur dan mengelola sumber dayanya. Dalam pembangunan suatu daerah tentunya sangat penting untuk mengetahui rancangan seperti apa yang dilakukan pemerintah dalam pengaturan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam yang dimilikinya. Anggaran menjadi sangat penting dalam merealisasikan kebijakan atau rancangan pemerintah untuk kemajuan daerah. Dalam hal ini anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menjadi bentuk rancangan anggaran tahunan oleh pemerintah daerah melalui persetujuan dan penetapan dari DPRD yang menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan, perencanaan pembangunan, pengelolaan pendapatan dan pengeluaran suatu daerah.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berperan penting sebagai landasan dalam pengawasan dan pemeriksaan anggaran daerah. Realisasi dalam pelaksanaan APBD seringkali tidak wajar dimana masih banyaknya pengelolaan anggaran pada beberapa wilayah di Indonesia rata-rata mempunyai kendala yang sama, diantaranya adalah masih banyaknya daerah yang terlambat menetapkan APBD (anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), struktur APBD yang kurang ideal dan penyerapan belanja yang relatif lambat (Arfan et al., 2016).

Sebagai Provinsi dalam kategori tempat wisata dengan sumber daya alam yang bagus NTB selayaknya mampu meningkatkan persaingan dan pendapatan melalui sektor-sektor unggulan yang dimiliki. Upaya pemerintah dengan pemberian subsidi, peminjaman dan penyaluran dana untuk peningkatan kualitas wisata di NTB nyatanya belum mampu efektif secara menyeluruh karena timbul masalah sumber daya manusia yang belum mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi yang telah berkembang (Murapi et al., 2022).

Menurut data Badan Pusat Statistik, perkembangan pertumbuhan ekonomi di NTB sudah semakin baik dilihat dari hasil PDRB tiap tahunnya mengalami peningkatan tahun 2017 sebesar Rp.94.608.209,35, tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp.90.349.129,08, tahun 2019 naik menjadi Rp.93.872.438,65, tahun 2020 masih berada diangka konstan sebesar Rp.93.288.873,64, tahun 2021 meningkat sebesar Rp.95.437.855,96, dan tahun 2022 meningkat pesat sebesar Rp.102.074.074,21. Dari data tersebut mengindikasikan semakin meningkat pertumbuhan ekonomi di NTB. Namun, realitas dari implementasi lapangan masih belum mampu membawa Provinsi NTB sebagai wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus.

Dalam penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa hambatan pendapatan PAD di NTB terjadi karena 2 faktor yakni internal dan eksternal, dimana faktor internal berasal dari kurang faham dan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak, faktor eksternalnya ialah perkembangan teknologi yang belum mampu diterapkan (Mutihawadi & Arisdiyoto, 2023). pelaksanaan otonomi daerah Provinsi NTB belum mampu mandiri secara ekonomi dimana sebagian besar kota/kabupaten masih bergantung pada

transfer pemerintah pusat. Salah satunya ialah tingkat desentralisasi fiskal di Kota Mataram masuk dalam kategori kurang dan menunjukkan bahwa dalam anggaran masih sangat bergantung pada penerimaan pusat maupun provinsi seperti dari dana hibah, dana bagi hasil, dana perimbangan, dana bantuan keuangan provinsi (Alwi et al., 2020).

Menurut penelitian sebelumnya mengemukakan bahwa kebijakan fiskal pemerintah melalui APDB belum mampu menggerakkan perekonomian di Kabupaten Sumbawa, hal ini dilihat dari melemahnya sektor pertanian, perdagangan hotel dan restoran, industri pengolahan dan sektor pariwisata lainnya (Fitriyani et al., 2020). Realitas kondisi lingkungan dan perekonomian Provinsi NTB tahun 2017-2022 menurut data realisasi keuangan dapat dikatakan membaik jika dilihat dari beberapa tahun-tahun kebelakang. Meskipun tahun 2017-2022 terbilang baik, masih banyak realisasi lapangan menunjukkan masih kurangnya efektivitas alokasi pendanaan di NTB dalam pemenuhan pelayanan publik. Dari hasil beberapa penelitian menunjukkan kemandirian keuangan Lombok Tengah salah satunya pada tahun 2019-2021 masih dalam kategori kurang mandiri karena berada di 12,152% yang artinya pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan daerahnya (Rini & Suguharti, 2016).

Mengacu pada permasalahan yang kian berlarut-larut dimana pemerintah belum mampu menyediakan fasilitas yang mumpuni untuk mengentaskan permasalahan tersebut. Tiap tahun APBD di NTB mengalami kenaikan yang artinya keseriusan pemerintah dalam upaya peningkatan pembangunan di NTB sudah serius, namun belum mampu dicapai oleh pemerintah daerah. Melihat dari APBD yang masih belum optimal pengolahannya, sehingga perlunya diketahui sejauh mana APBD di limpahkan untuk dukungan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel pada komponen APBD terhadap PDRB di Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, nantinya dapat diambil langkah atau kebijakan yang sesuai untuk meningkatkan nilai PDRB di Nusa Tenggara Barat supaya berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah yang meningkat menunjukkan kondisi ekonomi daerah yang semakin baik.

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah Realisasi Anggaran NTB. Laporan data didapatkan melalui beberapa sumber yakni Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK). Analisis data diambil selama 5 tahun terakhir yakni tahun 2017 - 2022 di NTB dengan 2 Kota dan 8 Kabupaten.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis data panel. Penelitian deskriptif kuantitatif ialah penelitian yang menggunakan metode kuantitatif serta menggunakan analisis deskriptif untuk memahami arti data secara akademik. Penelitian

kuantitatif juga diartikan sebagai pendekatan penelitian yang mewakili paham positivisme (Mulyadi, 2011).

Data panel adalah jenis data yang menggabungkan data cross-sectional dan time-series yang pengukurannya di waktu yang tidak sama (Sunengsih, 2009). Data cross-sectional diambil pada suatu titik waktu tertentu, sedangkan data time-series diambil secara berurutan dalam periode waktu tertentu. Data panel dapat memberikan keuntungan karena memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi efek variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dalam periode waktu tertentu dan juga antar unit observasi.

Teknik analisis data menggunakan regresi data panel yang terdiri dari 3 macam model, yakni Common Effects Model, Fixed Effects Model, dan Random Effects Model. Dari hasil perhitungan tiga model tersebut akan dilakukan selanjutnya pilihan model terbaik dengan menggunakan Uji Chow dan Uji Model. Hasil dari Uji Chow dilakukan untuk menentukan model regresi yang lebih tepat digunakan antara model Common Effects Model, Fixed Effect Model, dan Random Effects Model. Sedangkan untuk Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model regresi yang lebih tepat digunakan antara model Common Effects, Fixed Effects Model, dan Random Effects Model. Adapun persamaan model penelitian adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X1_{it} + \beta_2 \ln X2_{it} + \beta_3 \ln X3_{it} + \beta_4 \ln X4_{it} + \beta_5 \ln X5_{it} + e_{it}$$

dimana:

Y = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

X1= Pendapatan Asli Daerah

X2= Dana Alokasi Umum

X3= Dana Alokasi Khusus

X4= Dana Bagi Hasil

X5= Belanja Daerah

i = wilayah

t = waktu

e = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian regresi data panel untuk menguji pengaruh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di NTB Tahun 2017-2022. Dalam regresi data panel dilakukan uji pemilihan model terbaik yang digunakan sebagaimana disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Pemilihan Model

Uji Pemilihan Model	Prob	Keterangan
Uji Chow	0,0000	Fixed Effect Model
Uji Hausman	0,2612	Random Effect Model
Uji LM	0,0000	Random Effect Model

Padal tabel 1 diperoleh hasil uji Chow dengan nilai Prob Cross-section F sebesar $0,0000 < 0,05$ sehingga yang terpilih adalah Fixed Effect Model. Selanjutnya untuk uji Hausman mempunyai hasil Prob. $0,2612 > 0,05$ maka yang terpilih adalah Random Effect Model. Berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman diperoleh model yang berbeda, maka dilanjutkan dengan uji LM yang mana nilai prob Breusch-Pagan $0,0000 < 0,05$, sehingga terpilih Random Effect Model.

Tabel 2. Hasil Regresi Panel dengan Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7053324.	2572535.	2.741780	0.0083
PAD	3.892792	6.055273	0.642876	0.5230
DAU	-0.967607	1.939715	-0.498840	0.6199
DAK	-5.278371	4.073507	-1.295780	0.2006
DBH	44.01514	13.82203	3.184420	0.0024
BD	1.070251	1.396863	0.766181	0.4469
R-squared	0.212681			
Adjusted R-squared	0.139781			
F-statistic	2.917437			
Prob(F-statistic)	0.021057			

Pada tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai F-statistic sebesar 2.917437 dengan nilai probabilitas (F-statistic) yaitu $0.021057 < 0.05$ yang artinya terdapat pengaruh antara PAD, DAU, DAK, DBH dan BD terhadap PDRB di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2017-2022. Selanjutnya untuk hasil pengujian Koefisien Determinasi dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R-Squared sebesar 0.139781 atau 13%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan variabel independen yang terdiri dari PAD, DAU, DAK, DBH dan BD bisa menjabarkan variabel PDRB di Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2017-2022 sebesar 13%, sedangkan lainnya sebesar 87% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak ada dalam model penelitian (Janie, 2012).

Variabel Pendapatan Asli Daerah menunjukkan t hitung $0.642876 < t$ tabel, dari hasil tersebut menunjukkan bahwasanya, itu menunjukkan bahwa koefisien PAD tidak signifikan secara statistik dalam model regresi. Dengan kata lain, hasil analisis menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara PAD dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah Nusa Tenggara Barat berdasarkan data yang digunakan. Setiap terjadi peningkatan atau penurunan PAD tidak secara signifikan memengaruhi PDRB di NTB. Dari hasil tersebut menunjukkan selama 6 tahun terakhir APBD dari sektor PAD belum efektif dan signifikan terhadap perekonomian di Kota/Kabupaten Nusa Tenggara Barat. Hasil tersebut

didukung dari beberapa problem yang terjadi selama kurun waktu 2017-2022. Penelitian ini selaras dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kinerja keuangan Provinsi NTB tidak optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah dan dari hasil kinerja PAD terhadap pendapatan daerah masih rendah (I Dewa GDE Bisma & Hery Susanto, 2003).

Variabel Dana Alokasi Umum mempunyai t hitung $0.498840 < t$ tabel sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Nusa Tenggara Barat. Dana Alokasi Umum tidak signifikan terhadap PDRB menunjukkan bahwasanya realisasi anggaran DAU tidak sepenuhnya dilokasikan kepada kegiatan ekonomi. Selain itu, mengacu misi yang diusung oleh Gubernur NTB yakni mayoritas berorientasi pada pembangunan layanan publik seperti perbaikan jalan, penanggulangan bencana, pembangunan pendidikan, peningkatan kesehatan, alokasi sampah dan peningkatan pendidikan. Dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sangat mempengaruhi arah penggunaan alokasi dana umum sehingga dana alokasi umum belum signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya dimana DAU tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan (Monica & Sa'roni, 2022).

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas dapat diketahui bahwa nilai t tabel sebesar -1.295780 dengan probabilitas 0.2006 dan nilai coefficient sebesar -5.278371 , sedangkan t tabel sebesar 1.67356 dimana nilai t hitung $< t$ tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_1 . Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap PDRB di Nusa Tenggara Barat. Secara umum rata-rata prioritas anggaran Dana Alokasi Khusus disalurkan kepada pembiayaan pendidikan di NTB baik dalam bentuk fasilitas pembangunan maupun dana kegiatan pendidikan. Anggaran Dana Alokasi Khusus tidak digunakan untuk pembiayaan ekonomi secara langsung, sehingga dana khusus secara umum dikelola secara efektif untuk pembiayaan infrastruktur publik dan tidak digunakan untuk upaya peningkatan PDRB secara langsung, hal tersebut bukan berarti anggaran Dana Alokasi Khusus tidak dikelola dengan baik namun sesuai dari fungsi Dana Alokasi Khusus untuk digunakan sebagai pendukung pelaksanaan program tertentu yang dianggap prioritas maupun kebijakan dari pemerintah. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Provinsi Bangka Belitung, dimana hasil penelitian menunjukkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Nurhayati et al., 2019).

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas dapat diketahui bahwa Dana Bagi Hasil memiliki nilai t tabel sebesar 3.184420 dengan probabilitas 0.0024 dan nilai coefficient sebesar 44.01514 , sedangkan t tabel sebesar 1.67356 dimana nilai t hitung $< t$ tabel. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan DBH berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Nusa Tenggara Barat. Realitas dana bagi hasil yang diterima untuk Kota/Kabupaten di NTB secara umum mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Hasil Pertanian di NTB membuahkan hasil yang besar salah satunya di pertanian

tembakau yang terkenal di NTB sebagai penghasil tembakau terbaik di Indonesia adalah bentuk realisasi dana bagi hasil dari pertanian yang besar, sehingga dana bagi hasil sangat berdampak besar terhadap pertumbuhan PDRB di NTB. Hasil penelitian ini berkaitan dengan hasil penelitian sebelumnya dimana Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Boyolali (AlQomariah et al., 2022).

Berdasarkan hasil Belanja Daerah diatas dapat diketahui bahwa nilai t tabel sebesar 0.766181 dengan probabilitas 0.4469 dan nilai coefficient sebesar 1.070251, sedangkan t tabel sebesar 1.67356 dimana nilai t hitung < t tabel, maka H₀ ditolak dan menerima H₁. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan BD tidak berpengaruh terhadap PDRB di NTB. Mayoritas realisasi anggaran belanja daerah di NTB menunjukkan bahwa alokasi dana mayoritas belum secara efektif ditujukan pada pertumbuhan ekonomi ataupun produktivitas ekonomi lainnya. Sebagian besar anggaran digunakan untuk keperluan rutin atau administratif, secara umum anggaran belanja daerah belum dapat dikelola secara efektif dan efisien sehingga anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi. Hasil penelitian ini berkaitan dengan penelitian sebelumnya dimana belanja daerah tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika (Taher & Tuasela, 2019).

KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Realisasi APBD melalui variabel (PAD, DAU, DAK, DBH, dan BD) terhadap PDRB belum mampu mempengaruhi peningkatan PDRB di NTB. Dari kelima variabel hanya Dana Bagi Hasil yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan empat variabel lainnya tidak signifikan. Hal tersebut terjadi dikarenakan fokus pembiayaan yang mayoritas tidak dianggarkan kearah fokus peningkatan PDRB, masih kurang mandiri daerah untuk mengelolala daerahnya sendiri. Secara keseluruhan daerah sudah mampu melaksanakan tugas otonom daerah dengan baik dalam pembangunan, namun dalam variabel yang diteliti pemerintah belum mampu merealisasikan anggaran kepada kegiatan pengembangan pertumbuhan ekonomi di NTB.

DAFTAR PUSTAKA

- AlQomariah, A. N. R., Pardanawati, S. L., & Utami, W. B. (2022). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Boyolali. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 1(2), 60–69. <https://doi.org/10.53088/jikab.v1i2.9>
- Alwi, M., S. I. D. K. Y., & Alkandia, L. D. (2020). *ANALISIS PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT*. 1(1), 33–42.
- Arfan, Afrizal, M., & Darwanis. (2016). Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sabang. *Jurnal Magister Akuntansi*, 5(3), 1–10.
- Fitriyani, I., Ismawati, Wahida, N., & Asmini. (2020). Pengaruh Belanja Daerah

- Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumbawa Tahun 2012-2018. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 116–126.
- I Dewa GDE Bisma, & Hery Susanto. (2003). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007. *Ganec Swara*, 4(3), 75–86.
- Janie, D. N. A. (2012). *Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda dengan SPSS*. Semarang University Press.
- Monica, F., & Sa'roni, C. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019). *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(2), 819. <https://doi.org/10.20527/jiep.v5i2.7031>
- Mulyadi, M. (2011). *PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF SERTA PEMIKIRAN DASAR MENGGABUNGKANNYA*. 15(1), 127–138.
- Murapi, I., Astarini, O., & Muliani, M. (2022). Potensi Sektor Pariwisata sebagai Strategi Pemulihan Ekonomi Provinsi NTB. *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, 3(1), 43–54. <https://doi.org/10.30812/rekan.v3i1.1844>
- Mutihiawadi, R., & Arisdiyoto, I. (2023). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Pada Badan Pengelola Pendapatan Asli Daerah). *JISIP (Jurnal Ilmu ...)*, 7(3), 2220–2224. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5291/http>
- Nurhayati, Zukhri, N., & Valeriani, D. (2019). Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Perekonomian Daerah Pada Era Otonomi Daerah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *IJAB: Indonesian Journal of Accounting and Business*, 1(1), 15–28. <https://doi.org/10.33019/accounting.v1i1.2>
- Rini, A. S., & Suguharti, L. (2016). Jurnal Ilmu Ekonomi. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 1(2), 88–104.
- Sunengsih, I. G. N. M. J. N. (2009). Kajian analisis regresi dengan data panel. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan, Dan Penerapan MIPA*, 51–58.
- Taher, S., & Tuasela, A. (2019). Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Mimika. *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)*, 3(2), 40–58. <http://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/view/80>